

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur baik di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai tingkat pemerintahan terendah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, desa diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola keuangan secara mandiri serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri dan terus mengembangkan potensi yang ada, diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan wajib diawasi oleh pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjebak dalam tata kelola keuangan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam mengelola keuangan, desa diberikan kebebasan dalam

penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan efektif terkait transaksi keuangan dan kegiatan ekonomi lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Peran besar yang diterima oleh desa tentu disertai dengan tanggung jawab besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa bersumber dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain. Dana desa tersebut akan di kelola oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa tersebut.²

Terbentuknya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi desa yang mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10.³

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

²Menteri Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (5)” dalam <http://binapemdes.kemendagri.go.id>, diakses pada 24 Desember 2022

³ Nyimas Latifah Letti Aziz, “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa”, Jurnal Penelitian Politik, 13 (2), 193-211 (Jakarta: Peneliti Pusat Penelitian Politik, LIPI, 2016), hlm. 193-194

pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga visi desa serta kesejahteraan masyarakat terwujud.⁴

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kemendagri telah meluncurkan aplikasi berbasis *online* yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2015 dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik serta laporan keuangan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. SISKEUDES dikembangkan untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan.⁵

Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa membawa perubahan yang positif terhadap pengelolaan keuangan desa, diantaranya mempermudah dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, pelaporan keuangan sesuai waktu yang ditentukan dan menghasilkan laporan keuangan desa yang akuntabel. Aplikasi Sistem Keuangan Desa sangat berperan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga sangat penting menerapkan aplikasi ini di desa-desa.

⁴ Yuliansyah dan Rusmianto, "Akuntansi Desa", (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 47

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Aplikasi SISKEUDES untuk Transparansi Keuangan Desa" dalam <https://www.kominfo.go.id>, di akses pada 23 Desember 2022

Dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.⁶

Penyaluran dan pencairan dana desa kepada masyarakat banyak mengalami keterlambatan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Hal ini juga disebabkan oleh penerapan aplikasi SISKEUDES yang tidak efektif. Untuk itu perlu diadakannya bimbingan teknis mengenai pengaplikasian SISKEUDES terutama bagi perangkat desa. Tentu harus didukung oleh kompetensi dari perangkat desa serta kemampuan dalam mengoperasikan sistem operasi komputer dengan baik dan benar.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan peneliti dalam sebuah artikel berita *online*.⁷ Dalam berita tersebut disampaikan bahwa terdapat beberapa desa yang belum menginput data atau berkas ke aplikasi Sistem

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019), hlm. 33

⁷ Radar Bromo, “*Sampai Juli 2022, 26 Desa di Kabupaten Probolinggo Belum Kirim Berkas Pencairan Dana Desa (DD)*” dalam www.radarbromo.jawapos.com diakses pada 21 Desember 2022

Keuangan Desa (SISKEUDES) sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pencairan dana desa. Penyebabnya kemungkinan karena berkas-berkas yang dibutuhkan belum lengkap sehingga tidak dapat diproses.

Kecamatan Besuk merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang memiliki luas wilayah sebesar 35,03 km². Kecamatan Besuk terdiri dari 17 desa, yaitu: Desa Matekan, Krampilan, Klampokan, Jambangan, Kecik, Bago, Alasnyur, Sindetanyar, Sindetlami, Sumurdalam, Besuk Kidul, Besuk Agung, Randujalak, Alas Tengah, Alas Kandang, Alas Sumur Lor, serta Desa Sumberan.⁸ Desa di Kecamatan Besuk sudah mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES tetapi masih belum maksimal. Secara umum, penerapan aplikasi SISKEUDES hanya pada tahapan penyusunan APBDes namun saat penyerapan dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi tersebut. Dalam praktiknya pengelolaan keuangan desa masih ada yang dikerjakan secara manual. Hal ini dikarenakan lamanya proses penginputan melalui aplikasi SISKEUDES serta operator yang bertugas kurang mahir dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Akibatnya, seringkali terjadi keterlambatan dalam pembuatan dokumen terkait pencairan dana desa.

Dengan adanya temuan ini, muncul pertanyaan dari penulis apakah perangkat desa sudah mumpuni dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES dan apakah penerapan aplikasi tersebut efektif terhadap pengelolaan terkait keuangan yang ada di desa, sehingga di sini juga dapat dilihat bahwa

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, “*Kecamatan Besuk dalam Angka 2021*”, (Probolinggo : Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 5

pentingnya menerapkan aplikasi SISKEUDES yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi desa termasuk mempermudah proses pencairan dana desa.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Bimbingan Teknis, Kompetensi Perangkat Desa dan Kemampuan Pengoperasian Komputer terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Pentingnya diadakan bimbingan teknis aplikasi SISKEUDES untuk memudahkan pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) yang dikelola oleh aparat desa.
2. SDM perangkat desa yang kurang memadai menjadi kendala dalam implementasi aplikasi SISKEUDES sehingga pengelolaan keuangan desa khususnya pencairan Dana Desa (DD) terhambat.
3. Dibutuhkannya perangkat desa yang memiliki kompetensi mengenai pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES.
4. Pengguna (*user*) harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer agar dapat menggunakan aplikasi SISKEUDES secara efektif dan efisien.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh bimbingan teknis terhadap efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana pengaruh kemampuan pengoperasian komputer terhadap efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo?
4. Bagaimana pengaruh bimbingan teknis, kompetensi perangkat desa dan kemampuan pengoperasian komputer secara simultan terhadap efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh bimbingan teknis terhadap efektivitas penerapan SISKEUDES di Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas penerapan SISKEUDES di Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan pengoperasian komputer terhadap efektivitas penerapan SISKEUDES di Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

4. Untuk menganalisis pengaruh bimbingan teknis, kompetensi perangkat desa dan kemampuan pengoperasian komputer terhadap efektivitas penerapan SISKEUDES di Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan mampu memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat secara teoritis ataupun secara praktis khususnya bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan umumnya bagi masyarakat luas.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan tentang adanya bimbingan teknis, kompetensi perangkat desa dan kemampuan pengoperasian komputer dalam meningkatkan efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai moment pelatihan, pengembangan ilmu dalam bidang yang diteliti, serta sebagai sarana untuk menambah pengetahuan teoritis yang didapatkan di dunia perkuliahan yang menjadikan praktis di lapangan.

b. Bagi Institusi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang andal dalam pengambilan keputusan dan dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi terkait faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES, sehingga dapat diaplikasikan dengan efektif dan efisien terutama dalam proses pencairan dana desa.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini, diharapkan memberikan tambahan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi dan tambahan referensi ilmiah untuk rujukan perbendaharaan di perpustakaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES.

d. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan rujukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan aplikasi SISKEUDES atau sistem keuangan desa. Selain itu, dapat dijadikan sebagai sumber informasi, masukan dan tambahan data bagi peneliti selanjutnya, yang memiliki ketertarikan melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Terkait luasnya ruang lingkup mengenai faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES, maka peneliti telah

menentukan variabel independen yang diduga memengaruhi efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES ini agar bisa dikaji lebih mendalam. Adapun variabel independen tersebut yaitu bimbingan teknis (x_1), kompetensi perangkat desa (x_2) dan kemampuan pengoperasian komputer (x_3). Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini yaitu efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES (y).

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang ada dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel independen, sedangkan masih banyak faktor lain yang memengaruhi efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES. Selain itu, adanya keterbatasan penelitian menggunakan kuesioner sebab terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran dan juga untuk menyamakan pemahaman terkait konsep yang dibahas dalam penelitian, penulis menyajikan penegasan istilah-istilah penting dalam judul penelitian:

a. Teori *Stewardship*

Teori ini menggambarkan tidak ada suatu keadaan para manajemen termotivasi oleh tujuan-tujuan individu namun lebih

ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk tujuan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang dirancang untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.⁹

b. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis maupun pelatihan terkait penerapan aplikasi SISKEUDES harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dan pelaporan keuangan desa menjadi efektif dan efisien. Indikator variabel bimbingan teknis dalam penelitian ini sesuai dengan pernyataan menurut Mangkunegara, sebagai berikut:¹⁰

- 1) Tujuan dan Sasaran
- 2) Instruktur atau Pelatih
- 3) Materi
- 4) Metode
- 5) Peserta

c. Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi perangkat desa adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh salah satu organ pemerintah desa, selain kepala desa untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Terdapat tiga komponen utama

⁹ Donaldson dan Davis, "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns" *Australian Journal of Management*, dalam <https://journals.sagepub.com>, di akses pada 18 Juni 2023

¹⁰ A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, "Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 44

atau indikator pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan atau *skill* dan perilaku individu.¹¹

d. Kemampuan Pegoperasian Komputer

Menurut Laudon, pemakai (*user*) dalam hal ini operator SISKEUDES perlu untuk mengetahui dan memahami teknologi informasi yang digunakan perusahaan dalam sistem informasinya. Dengan pemahaman yang baik dari pemakai, arus informasi akan tersampaikan dan dapat diinterpretasikan dengan baik. Kemahiran dalam mengoperasikan komputer dan *software* akan menentukan efektivitas suatu paket multimedia yang digunakan. Kemampuan yang harus dimiliki dalam pembelajaran berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) adalah:¹²

- 1) Pengetahuan tentang komputer dan cara mengoperasikannya.
- 2) Kemampuan mengoperasikan *software* yang digunakan.
- 3) Pemahaman tentang operasi dan pengaturan keselamatan

e. Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa. Aplikasi ini sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).¹³

¹¹ Parulian Hutapea dan Nurianna Thoha, “*Kompetensi Plus*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 28

¹² Munir, “*Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*”, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 123

¹³Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Aplikasi Sistem Keuangan Desa*, dalam <https://www.bpkp.go.id>, diakses pada 5 Desember 2022

Mutiarin mengutip pernyataan menurut Campbell J. P mengatakan bahwa indikator pengukuran efektivitas secara umum adalah:¹⁴

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilas sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan yang menyeluruh

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang berkaitan langsung dengan topik penelitian serta bertujuan untuk memperjelas dari judul penelitian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Secara operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh bimbingan teknis, kompetensi perangkat desa dan kemampuan pengoperasian komputer terhadap efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan skripsi digunakan untuk memudahkan penjelasan mengenai penyusunan skripsi yang di dalamnya terdiri dari keseluruhan isi penelitian. Berikut isi sistematika penulisan skripsi :

¹⁴ Dyah Mutiarin, "Manajemen Birokrasi dan Kebijakan", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 97

- Bagian Awal Terdiri dari halaman sampul depan; halaman judul; halaman persetujuan; halaman pengesahan; motto; persembahan; kata pengantar; daftar isi; daftar gambar; daftar tabel; daftar lampiran; dan abstrak.
- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah; identifikasi masalah, rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; ruang lingkup dan keterbatasan penelitian; penegasan istilah; dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II Landasan teori yang terdiri dari teori yang membahas variabel/ sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/ sub variabel kedua dan teori yang membahas variabel/ sub variabel ketiga; kajian penelitian terdahulu; kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.
- BAB III Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian; populasi; sampling dan sampel penelitian; sumber data; variabel dan skala pengukuran; teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta teknik analisis data.
- BAB IV Hasil penelitian yang terdiri dari hasil penelitian dimana di dalamnya berisi mengenai deskripsi data dan pengujian hipotesis.

- BAB V Pembahasan yang terdiri dari pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.
- BAB VI Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
- Bagian Akhir Terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.